



2023

RENCANA KERJA PERUBAHAN



DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas Bimbingan dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi rencana kerja untuk Tahun 2023 pada OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan dan Kelemahan Baik dari segi penulisan maupun kualitas materi. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi penyempurnaannya.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pembangunan sektor Pertanian khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Pangkajene Sidenreng, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kab. Sidenreng Rappang

Ibrahim, SP

NIP. 19720223 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	4
I.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	6
II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	6
II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	17
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB IV. PENUTUP	34
IV.1 Kaidah Pelaksanaan	34
IV.2 Rencana Tindak Lanjut	36

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang.....	10
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	27

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD, dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD harus berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD sehingga antara renja OPD dengan dokumen RKPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”* yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: *“Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*. Dengan memperhatikan visi dan misi, maka dapat dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada pengarahannya potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan pertanian terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan 2023

evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rencana Kerja Perubahan 2023

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);

14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36).

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Tahun 2023 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
- b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
- c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Terakumulasinya usulan hasil musrenbang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

- d. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Tahun 2018 sampai dengan 2023.
- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
- f. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya;

Bab II: Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi uraian berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Adapun total anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp 13.398.649.000,- yang bersumber dari APBD DAU dan DAK yang terdiri dari 9 program, 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan realisasi sampai pada triwulan II yaitu realisasi keuangan Rp 2.784.932.540,- (20,79%) dan realisasi fisik 18,50%. Hal ini disebabkan adanya usulan Musrenbang dan Pokok Pikiran Anggota DPRD dan kegiatan belum terealisasi 100% sampai pada triwulan II tahun 2023 dikarenakan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 77,27%.
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 64,02%.
 - 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target

Rencana Kerja Perubahan 2023

- 100% yang belum teralisasi disebabkan kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada tahun 2021 – 2023.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 66,67%.
 - 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 12,50% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
 - 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 80,00%.
 - 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 51,57% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
 - 8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target 100% yang terealisasi 67,44%.
 - 9) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan target 100% yang terealisasi 66,67%.
 - 10) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan target 100% yang terealisasi 66,67%.
 - 11) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 66,67%.
 - 12) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 25,10%.

- 13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 83,33%.
- 14) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 38,12%.
- 15) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana dengan target 100% yang terealisasi 69,05%.
- 16) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 66,67% disebabkan kegiatan tersebut tidak dianggarkan.
- 17) Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 66,71%.

Berdasarkan rincian kegiatan diatas yang belum melebihi target kinerja secara umum dikarenakan sisa target yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu pada triwulan IV 2023.

Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan belum mencapai target atau melebihi target kinerja dan akan dilaksanakan sisa target kinerja pada tahun selanjutnya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
 - a. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidereng Rappang.
 - d. Kurang maksimalnya kegiatan pembinaan akibat pembatasan gerak dan keterbatasan dana operasional.
 - e. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
 - f. Adanya perubahan anggaran untuk dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

3. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2023 yaitu :

- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.
- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
 - e. Untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian terutama yang sumber dananya dari APBN perlu disiapkan dana pendamping untuk desain, pengawasan dan operasional dalam rangka mendukung program prioritas kabinet kerja bidang pertanian.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) pada tabel II.1.

Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 7 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.09	Pangan												
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100 33.246.036.000	100,00 19.253.769.829	100 10.859.061.000	29,32 2.779.323.540	29,32	76,44	76,44			
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100 180.000.000	100,00 44.289.400	36,36 66.001.000	9,09 -	25,00	77,27	77,27			
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16 115.000.000	11 27.629.400	6 52.501.000	1 -	16,67	12,00	75,00			
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6 65.000.000	4 16.660.000	2 13.500.000	1 -	50,00	5,00	83,33			
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100 28.498.517.000	63,17 17.640.915.729	33,43 9.900.626.000	0,85 2.755.714.845	2,54	64,02	64,02			
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	317 28.370.517.000	211 17.545.945.101	106 9.864.626.000	- 2.755.714.845	-	211,00	66,56			

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	128.000.000	12	94.970.628	12	36.000.000	3	-	25,00	15,00	41,67
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan Jasa Jaminan	Unit	16	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	624.174.000	100	506.827.607	33,33	235.250.000	-	-	-	66,67	66,67
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.412.000	2	1.960.000	1	2.058.000	-	-	-	2,00	66,67
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	617.762.000	2	504.867.607	1	233.192.000	-	-	-	2,00	66,67
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	303.754.000	12,50	30.300.000	4	70.092.000	-	-	-	12,50	12,50
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	35	87.654.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	216.100.000	8	30.300.000	4	70.092.000	-	-	-	8,00	27,59
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.483.380.000	100,00	817.651.408	100,00	499.089.000	13,33	23.608.695	13,33	80,00	80,00
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	11.510.000	2	6.387.200	1	2.346.000	-	-	-	2	66,67

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	356.826.000	24	110.517.008	12	66.000.000	6	21.238.695	50,00	30	83,33
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	3	48.060.000	2	5.915.000	1	7.685.000	-	-	-	2	66,67
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	2.066.984.000	2	694.832.200	1	423.058.000	-	2.370.000	-	2	66,67
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	%	100	1.084.211.000	100	213.785.685	100,00	88.003.000	-	-	-	51,57	51,57
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	158	210.420.000	82	179.120.685	31	71.138.000	-	-	-	82	51,90
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	9	22.747.000	6	20.000.000	1	10.000.000	-	-	-	6	66,67
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	56	33.747.000	27	14.665.000	15	6.865.000	-	-	-	27	48,21
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penguatan Cadangan Pangan	%	7,50	2.000.000.000	7,00	2.409.483.600	-	-	-	-	-	93,33	93,33
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	100	2.000.000.000	150,00	2.409.483.600	-	-	-	-	-	150,00	150,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibangun	Unit	2	2.000.000.000	3	2.409.483.600	-	-	-	-	-	3,00	150,00

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	%	94,00	4.305.651.200	118,92	1.740.974.500	93,00	57.510.000	-	5.609.000	-	126,51	126,51
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	%	100	1.076.302.000	60,47	32.968.400	30,23	31.795.000	-	5.609.000	-	67,44	67,44
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	3	40.808.000	2	20.730.800	1	21.050.000	-	5.609.000	-	2	66,67
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	36	25.869.000	24	12.237.600	12	10.745.000	3	-	25,00	27	75,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina	Kelompok	4	565.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan		92,50	3.993.143.200	81,41	1.708.006.100	92,50	25.715.000	-	-	-	66,67	66,67
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	3	89.007.200	2	39.305.000	1	25.715.000	-	-	-	2	66,67
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	3.904.136.000	2	1.668.701.100	-	-	-	-	-	2	66,67
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	100	94.146.000	5,88	22.851.000	100,00	33.465.000	-	-	-	5,88	5,88
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta FSVA yang Tersusun	%	100	162.911.000	66,67	15.661.000	100,00	10.535.000	-	-	-	66,67	66,67
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	3	162.911.000	2	15.661.000	1	10.535.000	-	-	-	2,00	66,67

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani	%	100	65.000.000	-	7.190.000	100,00	22.930.000	-	-	-	-
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	65.000.000	1	7.190.000	1	22.930.000	-	-	1,00	33,33
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3.27	Pertanian												
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	%	100	468.205.738.090	139,64	8.648.618.662	80,25	1.606.637.000	63,17	-	78,72	63,17
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	100	16.348.263.000	25,10	8.648.618.662	50,00	1.606.637.000	-	-	-	25,10
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6	14.262.514.000	4	8.416.043.562	2	379.950.000	-	-	-	4
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	6	2.085.749.000	2	232.575.100	4	1.226.687.000	-	-	-	2
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	100	89.400.793.625	19,96	12.225.214.475	100,00	340.145.000	-	-	-	19,96
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100	94.975.000	66,67	23.619.000	100,00	24.270.000	16,67	-	16,67	83,33
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	36	94.975.000	24	23.619.000	12	24.270.000	6	-	50,00	30,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	%	100	24.534.411.000	38,12	12.201.595.475	3,18	315.875.000	-	-	-	38,12

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	31	2.300.000.000	7	640.523.000	1	30.000.000	-	-	-	7	22,70
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	141	8.035.800.000	26	2.257.942.800	4	70.000.000	-	-	-	26	18,44
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	56	9.010.000.000	46	5.722.493.500	1	205.000.000	-	-	-	46	82,14
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	750.000.000	5	589.549.000	-	-	-	-	-	5	71,43
3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	701.200.000	5	584.330.000	-	-	-	-	-	5	71,43
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.805.000.000	5	1.865.786.975	1	600.000	-	-	-	5	71,43
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	1.932.411.000	2	540.970.200	1	10.275.000	-	-	-	2	66,67
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100	4.211.764.000	69,05	513.570.706	100,00	6.500.000	53,64	-	53,64	53,64	53,64
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	4.211.764.000	69,05	513.570.706	100,00	6.500.000	53,64	-	53,64	69,05	69,05
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2.100	1.447.646.000	1.450	513.570.706	650	6.500.000	-	-	-	1.450	69,05
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	100	33.150.000	66,67	13.296.600	-	-	-	-	-	66,67	66,67

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluasan Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	100	33.150.000	66,67	13.296.600	-	-	-	-	66,67	66,67
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	3	33.150.000	2,00	13.296.600	-	-	-	-	2	66,67
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP		1:15	12.616.549.700	1:18	5.282.841.250	1:15	495.331.000	-	-	83,33	83,33
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	%	100	12.616.549.700	25,50	5.282.841.250	105,08	495.331.000	-	-	66,71	66,71
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	33	511.702.000	22	77.512.000	11	176.500.000	-	-	22	66,67
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6.002	5.267.515.700	4.003	2.260.983.600	1.999	283.440.000	-	-	4.003	66,69
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	33	6.338.779.000	22	2.838.456.900	11	28.400.000	-	-	22	66,67
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Milik Petani yang Dibentuk	Unit	2	36.790.000	1	9.308.750	1	5.000.000	-	-	1	50,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	461.763.000	3	96.580.000	1	1.991.000	-	-	3	100,00

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan subsektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang menangani sub sektor Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang menangani sub sektor Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan yang menangani sub sektor ketahanan pangan, Bidang Penyuluhan Pertanian yang menangani sub sektor penyuluhan Pertanian. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian; 4) alih fungsi lahan serta status dan kepemilikan lahan; 5) lemahnya kapasitas

kelembagaan petani dan penyuluh pertanian; 6) akses petani terhadap permodalan; 7) perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; 8) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal; 9) peningkatan distribusi, harga dan akses pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; dan 11) dampak pandemic covid-19. Isu-isu strategis tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di

lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usahan tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan *greennhouse* untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langkah pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan ushatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada

tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di pedesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan.

7. Perbaiki Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus

Belum berkembangnya agroindustri di pedesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depannya perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri di pedesaan. Selain itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

8. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

9. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa,

lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal.

10. Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

11. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

12. Dampak Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan *Covid-19*. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian. Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan.

Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi *Covid-19* terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK dan lain-lain) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 tersebut telah mempertimbangan beberapa faktor, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah, visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024 dan tema pembangunan pada tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2024.

Pada tahun 2023 jumlah anggaran dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang bersumber dari DAU. Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum mengalami pergeseran APBD sebesar Rp 13.307.135.000,- dan setelah mengalami pergeseran anggaran menjadi sebesar Rp 13.398.649.000,-. Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 dapat dilihat Tabel III.1.

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Lembar : 1 dari 7 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.09	Pangan			10.923.246.000				10.950.036.000		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah			10.805.746.000			10.859.061.000		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	66.001.000			100%	66.001.000	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	6 Laporan	52.501.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Laporan	52.501.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	13.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	13.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	9.900.626.000			100%	9.900.626.000	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	106 Orang/ Bulan	9.864.626.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	106 Orang/ Bulan	9.864.626.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	36.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	36.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	202.055.000			100%	235.250.000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.058.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.058.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	199.997.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	233.192.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	37.000.000			100%	70.092.000	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Unit	37.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Unit	70.092.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	500.816.000		Kab. Sidenreng Rappang	100%	499.089.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	2.346.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	2.346.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	7.685.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	7.685.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	424.785.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	423.058.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		100%	99.248.000			100%	88.003.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	31 Unit	82.383.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	31 Unit	71.138.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	15 Unit	6.865.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	15 Unit	6.865.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita		93,00%	80.000.000			93,00%	57.510.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	100%	41.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	100%	31.795.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	26.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	21.050.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	15.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	10.745.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan		92,50	39.000.000	42 Kelompok Wanita Tani		92,50	25.715.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	39.000.000	4 Kelompok Wanita Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	25.715.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		100%	37.500.000			100%	33.465.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta FSVA yang Tersusun		100%	37.500.000			100%	10.535.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	10.535.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani		100%	20.000.000			100%	22.930.000	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	35.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	22.930.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.27	Pertanian									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian		100%	1.643.683.000			100%	1.606.637.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100%	1.643.683.000			100%	1.606.637.000	

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	379.950.000	1999 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	379.950.000	1999 Kelompok Tani
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	1.263.733.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	1.226.687.000	Kelompok Tani
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian		100%	270.875.000			100%	340.145.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	30.000.000			100%	24.270.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	30.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	24.270.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian		100%	240.875.000			100%	315.875.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	30.000.000	1 Kelompok Tani
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		-	-	-		4 Unit	70.000.000	1 Kelompok Tani
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	205.000.000	1 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	205.000.000	1 Kelompok Tani
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	25.600.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	600.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kec. Pitu Riase	1 Unit	10.275.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kec. Pitu Riase	1 Unit	10.275.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		100%	6.500.000			100%	6.500.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Wt. Sidenreng dan Dua Pitue	100%	6.500.000			100%	6.500.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pitu Riase	650 Hektar	6.500.000	450 Petani	Pitu Riase	650 Hektar	6.500.000	450 Petani
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP		1:15	445.331.000			1:15	495.331.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian		100,00%	445.331.000			100,00%	495.331.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	176.500.000	Penyuluh ASN dan Penyuluh PPPK	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	176.500.000	Penyuluh ASN dan Penyuluh PPPK
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	1999 Unit	233.440.000	1999 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1999 Unit	283.440.000	1999 Kelompok Tani
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	28.400.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	28.400.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2023							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Milik Petani yang Dibentuk	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	5.000.000	1 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	5.000.000	1 Kelompok Tani
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	1.991.000	1 Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	1.991.000	1 Kelompok Tani

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 yang disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Catatan penting dalam Renja Tahun 2023 yang perlu diperhatikan adalah bahwa :

1. Produksi dan Produktivitas pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan dapat terjaga dan meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pembangunan pangan dan pertanian perlu dipastikan penganggarannya dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19, pencapaian visi dan misi kepala daerah. Ketahanan pangan perlu dipastikan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023 ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya, sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Seluruh unsur di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya, melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Skala prioritas dalam rasionalisasi anggaran baik program/kegiatan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Sidenreng Rappang tahun 2023 selalu disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik rencana tahunan jangka menengah maupun jangka panjang.

4. Perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023 dapat dipastikan berjalan dengan baik.
5. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

IV.2. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, secara normatif telah diupayakan sedemikian rupa sehingga memuat program/kegiatan selama tahun 2023. Beberapa indikator keberhasilan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renja, tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras dedikasi, loyalitas dan integritas dari seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja Perubahan 2023

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2022 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya pembangunan yang lebih maju.

Pangkajene Sidenreng, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kab. Sidenreng Rappang

Ibrahim, SP
NIP. 19720223 200003 1 002